

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Tinjauan Pustaka	21
2.1.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	21
2.1.2. Teori Pengeluaran Pemerintah	24
2.1.2.1 Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik	24
2.1.2.2 Pengeluaran pemerintah secara mikro	28
2.1.2.3 Pengeluaran pemerintah secara makro	28
2.1.3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	31
2.1.4. Pelayanan Publik	35
2.1.5. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Umum.	38
2.1.6. Pengukuran Efisiensi Kinerja Pelayanan Publik	39
2.1.7. Kemiskinan	41
2.1.8. Lingkaran Perangkap Kemiskinan	44
2.1.9. Hubungan Desentralisasi, Pelayanan Pulik dan Pengurangan Kemiskinan	47
2.1.10. Penelitian Terdahulu	51
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis	60
2.3. Hipotesis	62
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Definisi Operasional Variabel	64
3.1.1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (PUB)	65
3.1.2. Variabel Kemiskinan (POV)	65
3.1.3. Indeks Kinerja Pelayanan Publik (IKPP) Bidang Pendidikan dan Kesehatan	66
3.1.4. Pengukuran Indeks Kinerja Pelayanan Publik	69
3.2. Jenis dan Sumber Data	72

3.3. Metode Pengumpulan Data	74
3.4. Teknik Analisis	74
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif	74
3.4.2. Analisis Kuantitatif (Regresi)	75
3.4.3. Pengujian Model	77
3.4.4. Analisis Regresi dengan Variabel Mediator	79
3.4.5. Pengujian Asumsi Klasik	86
3.4.5.1 Uji Autokorelasi	87
3.4.5.2 Uji Heteroskedastisitas	88
3.4.5.3 Uji Multikolinieritas	90
3.4.6. Pengujian Kriteria Statistik Analisis Regresi	91
3.4.6.1 Koefisien determinasi uji goodness of fit (uji R ²)	91
3.4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	92
3.4.6.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)	93
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	88
4.1. Letak Geografis	95
4.2. Penduduk	97
4.2.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk	97
4.2.2. Pendidikan di Jawa Tengah	99
4.2.3. Kesehatan di Jawa Tengah	102
4.2.4. Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah	106
4.3. Perekonomian Daerah	109
4.3.1. Struktur Perekonomian	109
4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	110
4.3.3. Keuangan Daerah	113
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	109
5.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	109
5.1.1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.	109
5.1.2. Perkembangan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan	113
5.1.3. Indikator Kinerja Pelayanan Publik (IKPP).	119
5.2 Hasil Analisis Data Kuantitatif	125
5.2.1. Analisis Variabel IKPP sebagai Variabel Intervening	125
5.2.2. Pengujian Model	127
5.2.2.1 F Test	127
5.2.2.2 Hausman Test	128
5.2.3. Pengujian Asumsi Klasik	130
5.2.3.1 Uji Autokorelasi (D-W)	130
5.2.3.2 Uji Multikolinearitas	131

5.2.3.3 Uji Heterokedastisitas	131
5.2.4. Pengujian Kriteria Statistik	132
5.2.4.1 Koefisien diteriminasi (R ²)	132
5.2.4.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F)	133
5.2.4.3 Pengujian Secara Parsial (Uji t)	134
5.2.5. Mendeteksi Pengaruh Mediasi	135
5.3 Pembahasan	137
5.3.1. Pengaruh Pengeluaran Sektor Publik terhadap Kinerja Pelayanan Publik	137
5.3.2. Pengaruh Pengeluaran Publik, Indikator Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap kemiskinan.	141
BAB VI PENUTUP	148
6.1. Kesimpulan	148
6.2. Limitasi Penelitian	151
6.3. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perbandingan Kinerja Pelayanan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbagai Negara	9
Tabel 1.2. Perkembangan Kemiskinan Menurut BPS dan Bank Dunia, 1996-2008	11
Tabel 1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1996-2008	13
Tabel 1.4. Realisasi APBD Propinsi Jawa Tengah Dan Persentase Realisasi Bidang Pendidikan Dan Kesehatan, Tahun 2007-2009	14
Tabel 1.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin pada 6 Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2007 – 2009	16
Tabel 1.6. Perbandingan Kinerja Pelayanan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Pulau Jawa Tahun 2009	17
Tabel 4.1. Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2009	98
Tabel 4.2. Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009	100
Tabel 4.3. Angka Melek Huruf (AMH) Berbagai Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2009	101
Tabel 4.4. Banyaknya Dokter, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rata-Rata Dokter per Puskesmas di Jawa Tengah Tahun 2009	105
Tabel 4.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah menurut Daerah Tahun 1996 – 2010	107
Tabel 4.6. Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009	108
Tabel 4.7. Struktur PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 - 2009 (persen)	109

Tabel 4.8.	Nilai PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 dan 2009 serta Laju Pertumbuhan Tahun 2009 Menurut Lapangan Usaha	111
Tabel 4.9.	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Penggunaan Tahun 2008 dan 2009	112
Tabel 5.1.	Pengeluaran Sektor Publik Bidang Pendidikan dan Persentasenya terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2008	117
Tabel 5.2.	Pengeluaran Sektor Publik Bidang Kesehatan dan Persentasenya terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009	119
Tabel 5.3.	Perkembangan Kinerja Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 s.d 2009	121
Tabel 5.4.	Perkembangan Kinerja Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 s.d 2009	124
Tabel 5.5.	Perbandingan Indeks Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009	128
Tabel 5.6.	Hasil pengujian untuk menentukan Metode antara CEM dengan FEM melalui F Test	135
Tabel 5.7.	Hasil Pengujian untuk menentukan Metode antara FEM dengan REM melalui Hausman Test	136
Tabel 5.8.	Hasil Pengujian Heterokedastisitas (Uji Glejser)	139
Tabel 5.9.	Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Pada Persamaan $IKPP = \alpha + \beta_1 PUB + \varepsilon$	142
Tabel 5.10.	Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Pada Persamaan $POV = \alpha + \beta_1 PUB + \beta_2 IKPP + \varepsilon$	142
Tabel 5.11.	Perkembangan Pengeluaran Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 s.d 2009	152

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Keterkaitan Desentralisasi, Pelayanan Publik dan Pengurangan Kemiskinan	3
Gambar 1.2. Perkembangan Dana Perimbangan tahun 2002-2008	4
Gambar 1.3. Perkembangan Alokasi Belanja Publik pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2002-2008	6
Gambar 1.4. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 1996-2008	12
Gambar 2.1. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	30
Gambar 2.2. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	31
Gambar 2.3. Free Disposable Hull (FDH) dan Production Possibility Frontier	40
Gambar 2.4. Perangkap Kemiskinan	47
Gambar 2.5. Hubungan Otonomi Daerah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat	48
Gambar 2.6. Hubungan Desentralisasi, Pelayanan Publik dan Pengentasan Kemiskinan	49
Gambar 2.7. Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	62
Gambar 3.1. Model Pelayanan Publik (variabel komposit)	64
Gambar 3.2. Hubungan Tidak Langsung X mempengaruhi Y melalui M	80
Gambar 3.3. Model Analisis Jalur (Path Analysis)	82
Gambar 3.4. Kriteria Pengujian Autokorelasi	88
Gambar 4.1. Peta Provinsi Jawa Tengah	96
Gambar 4.2. Jumlah Siswa SD, SMP, SMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2005/2006 – 2009/2010	99

Gambar 4.3.	Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2009	104
Gambar 4.4.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Propinvi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (Rp. Milyar)	114
Gambar 4.5.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinvi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (Rp. Milyar)	115
Gambar 5.1.	Bobot Variabel Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan	127
Gambar 5.2.	Perbandingan antara Indeks Kinerja Pelayanan Publik dengan Pengeluaran Sektor Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009	130
Gambar 5.3.	Model Analisis Jalur (Path Analysis)	132
Gambar 5.4.	Hasil Pengujian Autokorelasi (Durbin-Watson Test)	137
Gambar 5.5.	Hasil Perhitungan Analisis Jalur (Path Analysis)	143

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran I	Penduduk Miskin Di Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah	168
Lampiran II	Belanja Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah	169
Lampiran III	Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah	172
Lampiran IV	Indeks Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2009	175
Lampiran V	Input Data Untuk Analisis Regresi	176
Lampiran VI	Hasil Uji F Test Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (Pub) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (Ikpp)	179
Lampiran VII	Hasil Uji F Test Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (PUB) Dan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (IKPP) Terhadap Kemiskinan (POV)	180
Lampiran VIII	Hasil Hausman Test Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (PUB) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (IKPP)	181
Lampiran IX	Hasil Uji Hausman Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (PUB) Dan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (IKPP) Terhadap Kemiskinan (POV)	182
Lampiran X	Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (PUB) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (IKPP)	183
Lampiran XI	Hasil Uji Heterokedastisitas Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (PUB) Dan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (IKPP) Terhadap Kemiskinan (POV)	184

Lampiran XII	Hasil Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (PUB) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (IKPP)	185
Lampiran XIII	Hasil Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik (PUB) Dan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (IKPP) Terhadap Kemiskinan (POV)	187